

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

Sertifikasi 500 UMKM per Tahun

SEMARANG – Sektor usaha kecil mikro menengah (UMKM) dan koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat Jawa Tengah. Untuk itu, butuh inovasi dan keterpihakan terhadap sektor tersebut agar keberadaannya benar-benar bisa maksimal dan dirasakan masyarakat.

Selain itu, keberadaan UMKM harus benar-benar terdata dan sudah tersertifikasi. Jika merujuk pada program “ecotren” yang dijanjikan Wakil Gubernur, Taj Yasin, maka pendidikan perkerjasama dan UKM serta pengembangan akses pembiayaan dan kapasitas bisnis mereka menjadi poin yang harus diprioritaskan.

“Karena sektor koperasi memang benar-benar sudah terbukti bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Jateng,” tegas Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah, Abdul Aziz.

Ia menambahkan, butuh anggaran tidak sedikit untuk mewujudkan semua itu. Tetapi pemprov dan pemerintah kabupaten/kota harus terus melakukan inovasi dan memperhatikan sektor UMKM di Jateng. Bahkan, sektor tersebut bisa menjadi upaya menekan angka kemiskinan. “Dengan begitu, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Pansus RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 ini tak menampik begitu sentralnya peran UMKM selama ini. Oleh karena itu, Pansus memutuskan untuk meningkatkan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM

“Jika sektor ini digarap serius pasti bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran”

RUKMA SETYABUDI
Ketua DPRD Jateng

dari 150 menjadi 500 per tahun. Serta memberikan penambahan alokasi anggaran bagi program Penguatan kelembagaan dan diversifikasi usaha koperasi pesantren dari 10 menjadi 100 koperasi pesantren tiap tahun.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan, saatnya pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota memperhatikan serius semakin bertambahnya UMKM di Jateng. Sektor tersebut sejauh ini sudah menunjukkan keberadaannya untuk mampu menguatkan perekonomian di Jateng.

“Saatnya memperhatikan serius UMKM demi mewujudkan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Pemprov Jateng harus lebih proaktif mendata sekaligus memberikan stimulan kepada pelaku usaha mikro kecil supaya bisa berkembang. Selama ini kendala utama yang dialami pelaku UMKM banyak yang kesulitan modal.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah baik Jateng maupun daerah. Jika sektor ini digarap serius pasti bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” tambahnya. (fth/zal)